

Perempuan, Aktivitas Keagamaan dan Ruang Publik: Analisis Hybrid Role di Dusun Semampir, Sidomulyo, Jawa Timur

Izatul Muhidah Maulidiyah^{1*}, Roma Ulinnuha²

^{1,2}Sunan Kalijaga State Islamic University; ¹izatulmuhidah09@gmail.com, ²roma.ulinnuha@uin-suka.ac.id

*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 05 Januari 2024

Artikel Diterima: 25 Juni 2025

Artikel Dipublikasikan: 30 Juni 2025

Abstrak: Agama yang kerap kali digunakan sebagai alat legitimasi atas patriarki dalam tatanan sosial, tidak secara jelas ditemukan dalam tatanan masyarakat dusun Semampir, Sidomulyo, Jawa Timur. Melalui aktivitas keagamaan: Diba'an, rutinan, tahlilan dan manaqiban, perempuan-perempuan setempat mampu mewujudkan ruang publik beriringan dengan perannya dalam ruang domestik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan. Artikel ini berargumen bahwa perempuan-perempuan dusun Semampir dengan ragam multiperan, mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, mereka mampu berperan aktif dalam ruang publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan di ruang publik melalui beberapa praktik keagamaan seperti Tahlilan, Ratiban, Manaqiban, Diba'an relevan terhadap strategi hibrida. Aspek relevan terletak bahwa kepercayaan subject terhadap ragam peran yang mampu disandang secara bersamaan. Perempuan-perempuan dusun Semampir percaya bahwa partisipasi keagamaan dapat dilakukan tanpa mengganggu tugas-tugas domestik.

Kata Kunci: Agama, Domestik, Perempuan, Ruang Publik

Abstract: Religion is often invoked to legitimise patriarchal structures within society; however, this dynamic appears less pronounced in the community of Dusun Semampir, Sidomulyo, East Java. In this context, religious gatherings such as Diba'an, Rotiban, Tahlilan, and Manaqiban serve as platforms that empower women to attain a degree of public agency while simultaneously fulfilling their domestic obligations. This study employs a qualitative methodology, utilising interviews and field observations to collect data. The findings suggest that women in Semampir, despite their multifaceted roles, actively and effectively participate in religious activities that extend their presence into the public sphere. The analysis reveals that their engagement in these religious practices aligns with the concept of hybridity, wherein individuals navigate and integrate multiple social roles. Notably, the women of Dusun Semampir embody a hybrid identity, demonstrating that religious participation can coexist harmoniously with domestic and professional responsibilities. This research thus contributes to broader discussions on gender, religion, and agency by highlighting how religious practices can facilitate women's public involvement without undermining their traditional roles.

Keywords: Domestic, Public Sphere, Religious, Women

1. Pendahuluan

Agama yang kerap kali oleh sebagian kalangan digunakan sebagai legitimasi atas batasan terhadap aktivitas perempuan pada cakupan ruang publik, tampaknya sedikit banyak

kurang begitu berlaku pada masyarakat dusun Semampir, desa Sidomulyo, Modo, Lamongan, Jawa Timur. Melalui agama, tepatnya kegiatan-kegiatan keagamaan, perempuan-perempuan setempat mampu bergerak di ruang publik. *Tahlilan, ratiban, manaqiban, diba'an, rabonan*, menjadi kegiatan rutin yang dilakukan perempuan pada setiap pekan. Agama hadir sebagai jalan perempuan berperan pada ruang publik dalam masyarakat, bersamaan dengan perannya sebagai ibu, ibu rumah tangga, pekerja, pun pendidik bagi anaknya. Melalui aktivitas keagamaan tersebut, perempuan setempat mampu berperan secara aktif dalam ruang publik masyarakat sosial.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman yang berlandas pada teks agama "Islam" dan dianggap sebagai dogma berpengaruh terhadap terwujudnya sistem patriarki pada suatu tatanan masyarakat yang terjadi pada wilayah Jawa Timur, tepatnya wilayah pesisir Madura (Sudarso, Keban, & Mas'udah, 2019), bahkan patriarki menjadi hasil konstruksi sosial masyarakat setempat yang menggunakan agama sebagai alat legitimasi (Supraptiningsih, Jubba, Hariyanto, & Rahmawati, 2023). Daerah pesisir cenderung kental dengan budaya patriarki, dan kurang memberikan hak bicara bagi perempuan, bahkan hak pemilihan untuk dirinya sendiri, layaknya proses untuk mengenyam pendidikannya sendiri (Agustina, 2021). Karena budaya patriarki yang begitu kental melekat di daratan Indonesia, tidak sedikit film yang mengilustrasikan perjuangannya, seperti kisah Ibu Kartini (Ernanda, 2023).

Perempuan dalam kajian akademisi selama ini dikaji guna mendapatkan hak kesetaraan yang harus didapatkannya dalam hubungan keluarga yang dibangun bersama suaminya. Kajian-kajian sebagian besar berangkat dari sistem patriarki yang begitu kental terhadap tatanan keluarga. Sistem patriarki yang diterapkan dianggap akan berakibat terhadap peran ganda yang harus diemban perempuan, sehingga memunculkan ketimpangan (Ahmad Rajafi, 2020), bahkan akan mampu memunculkan diskriminasi terhadap perempuan (Sakina & A., 2017). Bukan hanya itu, sistem patriarki yang selalu membatasi perempuan dalam ruang publik, cenderung berpihak terhadap asumsi bahwa peran perempuan hanya bersifat domestik (Korniawati & Rahim, 2024), yang demikian begitu kental di wilayah pulau Jawa.

Berbeda dengan masyarakat modern yang mulai sadar terhadap konsep kesetaraan, hingga mampu melerai penerapan konsep-konsep patriarki dalam tatanan keluarga, kemunculan kesadaran tersebut berpengaruh terhadap sistem yang diterapkan pada masyarakat. Alih-alih secara penuh memberikan tanggung jawab bersama terhadap ruang domestik, justru memunculkan peran ganda akibat penerapan - kombinasi budaya patriarki dan budaya masyarakat modern -, sehingga masih berlakunya sistem patriarki dan pemberian hak perempuan di ranah publik secara bersamaan. Bahkan masih berlangsung anggapan terhadap perempuan oleh norma sosial untuk melakukan pekerjaan rumah dan luar rumah

secara bersamaan (Sumra & Schillaci, 2015). Perubahan paradigma masyarakat terhadap perempuan untuk berdaya pada ruang publik dan masih berlangsungnya pemahaman tradisionalis yang menganggap bahwa ruang domestik sebagai tanggung jawab utama perempuan mampu mengantarkan terhadap multi peran dan multi beban yang harus disandang (Wibowo, 2012). Perempuan Dusun Semampir dengan berbagai predikat yang disandangnya secara bersamaan dengan gigih berusaha ikut serta berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang mendeskripsikan beban ganda terhadap perempuan maupun kelekatan budaya patriarki yang melekat pada masa transisi paradigma tradisional ke modern, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan penelitian terdahulu dalam upaya mendeskripsikan multi peran perempuan dengan tanggung jawab yang menyertainya. Melalui agama yang berfungsi sebagai sosial kontrol, kegiatan keagamaan mampu mempertemukan perempuan dalam kesamaan dari ragam latar belakang dalam kesetaraan. Proses pendeskripsian multi peran perempuan yang disandang masyarakat dusun Semampir terhadap usaha-usaha yang mereka lakukan berdampak terhadap penyikapan-penyikapan yang dimunculkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang secara efektif mampu mendeskripsikan data tentang pengalaman kelompok terhadap peran yang dijalani. Adapun penggalian data dilakukan dengan observasi lapangan, kemudian melakukan wawancara terhadap subjek dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah, perempuan dusun Semampir dengan predikat sebagai Ibu Rumah Tangga, Istri, Pendidik Anak, anggota tatanan masyarakat, pekerja bidang industri (karyawan pabrik), dan buruh Tani. Dari predikat-predikat tersebut setidaknya terdapat minimal empat yang disandang oleh perempuan-perempuan setempat. Proses wawancara dilakukan secara langsung, sehingga data yang peneliti dapat bersifat faktual dari para narasumber. Peneliti menganalisis dari hasil pengumpulan data dengan cara mengintegrasikannya dengan keadaan sosial dan hasil penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa agama sebagai pembatas ruang publik perempuan, justru memberikan jalan perempuan untuk berperan di ruang publik dan menyebabkan perempuan menyandang multiperan. Ruang publik yang hadir dalam bentuk kegiatan keagamaan mampu menjadi menjadi titik temu perempuan-perempuan di tengah keanekaragaman yang disandang perempuan setempat. Dari multi peran perempuan-perempuan dusun Semampir tersebut, penelitian ini akan fokus dalam menjawab beberapa permasalahan di antaranya tentang bagaimana peran perempuan-perempuan dusun Semampir; dan bagaimana bentuk kegiatan keagamaan yang dijadikan sebagai sarana ruang publik perempuan setempat. Melalui rumusan masalah tersebut menawarkan perspektif baru

tentang agensi perempuan di ruang publik melalui strategi hybrid role dalam aktivitas keagamaan.

2. Konsep Kesetaraan Gender untuk Masyarakat lebih Adil

Kesetaraan secara Bahasa mampu dipahami suatu keadaan di mana antara dua atau lebih dianggap sama baik dalam cakupan hak maupun nilainya. Pada artikel ini akan ditarik terhadap konsep kesetaraan gender dan sosial. Gender merupakan peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial yang melekat terhadap laki-laki dan perempuan dan merupakan hasil dari konstruksi masyarakat sosial yang bersifat tidak mutlak. Perbedaan demikian tentunya tidak akan dipermasalahkan jika tidak saling mendiskriminasikan antara satu dengan yang lainnya. Kesetaraan gender mampu dimaknai bahwa adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak secara sama sebagai manusia. Bukan hanya itu, kesetaraan gender memberikan ruang baik perempuan maupun laki-laki untuk ikut serta berperan aktif pada kegiatan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, serta kesamaan dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (Matara et al., 2023).

Adanya kesetaraan gender yang diterapkan terhadap tata keluarga ataupun tata masyarakat akan memberikan perubahan positif yang signifikan. Adapun dampak positif penerapan kesetaraan gender berdasarkan data di antaranya adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi (Fagan, 2015), meningkatnya inovasi dan tingkat produktivitas (World Economic Forum, 2018), perbaikan kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2009), bidang pendidikan meningkat lebih baik karena mudahnya akses pendidikan bagi perempuan, adanya pengurangan angka kemiskinan, mengingat pendapatan tidak hanya bergantung terhadap pihak laki-laki (suami) (Sen, 2021), pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan sebab perempuan menjadi berdaya yang bukan sekedar mengikuti dan menjadi tanggung jawab laki-laki (UN Woman, n.d.), dan meningkatnya partisipasi sosial-politik (Norris, 2005).

Kesetaraan jika ditarik terhadap konteks masyarakat sosial, mampu ditunjukkan dengan adanya tingkatan sama, kedudukan sama, tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah. Untuk menumbuhkan kesetaraan sosial perlu adanya prinsip-prinsip yang melekat padanya; tidak adanya perlakuan yang berbeda dalam hal kewajiban, setiap insan (laki-laki maupun perempuan) memiliki hak yang sama, yang kemudian mampu diterapkan. Menghindari adanya diskriminasi, perpecahan merupakan urgensi adanya kesetaraan, baik konteks gender maupun sosial. Keharmonisan menjadi impian adanya kesetaraan (Syarifah, 2022). Keniscayaan implementasi konsep kesetaraan lebih terhadap keragaman yang terdapat pada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (Fuadi, 2020). Keragaman pada kehidupan sosial

rentan menimbulkan konflik. Keadaan demikian jika dikontekstualisasikan pada masyarakat desa yang masih kental dengan konsep strata sosial, bisa memicu konflik terutama misalkan terkait *lifestyle* seseorang sebagai cerminan dari kekayaan dan kepemilikannya. Pada poin inilah urgensi konsep kesetaraan diterapkan demi terwujudnya keharmonisan dan kebaikan.

Peran Domestik dan Peran Publik Sebagai Produk Konstruksi Sosial

Peran domestik yang sering menjadi identitas sebagai peran perempuan merupakan wujud dari konstruk sejarah yang panjang. Anggapan demikian menggiring terhadap pemahaman bahwa peran domestik merupakan kodrat perempuan, bukan produk dari konstruksi sosial. Padahal jika ditarik terhadap pemahaman tokoh muslim, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak terdapat fatwa yang menyatakan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab penuh terhadap suatu pekerjaan (Asmawi, 2004), baik publik maupun domestik. Selaras dengan Asghar Ali Engineer secara tegas menyatakan bahwa ruang domestik yang selalu diidentikkan sebagai ruang perempuan bukan pandangan yang berdasar pada norma ajaran agama Islam (Engineer, n.d.; Farah, 2020). Dari pendapat tersebut tentunya seseorang selayaknya tidak menggunakan dalih agama sebagai upaya untuk menyudutkan dan membatasi ruang perempuan. Dari keterangan sebelumnya, mampu kita pahami bahwa asumsi perempuan cenderung pada ruang domestik merupakan pengaruh lingkungan sekitar, sebagai wujud dari konstruksi sosial masyarakat setempat, khususnya yang berkembang di Jawa.

Berdasarkan pada data tekstual maupun artefaktual tinggalan masyarakat Jawa kuno, terdapat penyebutan jenis pekerjaan yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya prasasti Jurungan (876 M), dan prasasti Waringin Pitu (1477 M) menyebutkan nama-nama penguasa desa, maupun daerah. Selaras dengan keberadaan prasasti, terdapat peninggalan berupa teks yang menjelaskan bahwa kaum perempuan cenderung terhadap kegiatan untuk mendalami etika, kesenian, puisi, dan laki-laki dengan terjun ke medan perang. Sedangkan data artefaktual yang didapatkan dari relief pada candi-candi yang berada di Kawasan Jawa Timur maupun Jawa Tengah berukirkan kegiatan perempuan dan laki-laki, seperti relief dengan tema pergi ke sawah antara barang yang dibawa laki-laki dan perempuan tidak sama; laki-laki membawa cangkul dan perempuan membawa bekal, laki-laki membajak dan perempuan bercocok tanam (Nastiti, 2016).

Berbeda dengan konteks masyarakat modern, telah banyak dijumpai kalangan perempuan ikut serta berperan pada ruang publik, baik sektor bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, politik, atau bahkan sektor-sektor yang laki-laki sebagai dominan terdapat keberadaan perempuan. Seperti Amalia Adininggar Widyasanti sebagai pelaksana tugas kepala badan pusat statistic. Menurut Prabuningrat, keberhasilan perempuan dalam berkarir

seimbang dengan keberhasilan karir laki-laki (Prabuningrat, 1997). Keadaan demikian mendapatkan penguatan dari mufassir kontemporer, Quraish Shihab yang secara langsung mengetahui konteks ke-Indonesia-an menyatakan adanya hak bagi perempuan untuk berperan dalam bidang ekonomi yakni bekerja, selama pekerjaan butuh mereka, atau mereka butuh pekerjaan, dan mampu menjalannya dengan cara yang terhormat, sopan santun, demi terwujudnya *maslahah* dan terhindar dari *mafsadah* (Shihab, 2013).

Pergeseran Budaya Sosial Masyarakat Tradisional ke Modern

Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sering berkaitan dengan modernisasi, industrialisasi, dan pembangunan (Susilawati, 2012). Keadaan demikian mampu mendorong masyarakat lebih maju dari keadaan sebelumnya (Giddens, 2008). Perubahan Sosial mampu terjadi akibat faktor internal maupun eksternal yang termasuk pada cakupan faktor eksternal adalah komunikasi dengan orang atau kelompok masyarakat luar, yang mampu mendapatkan informasi dan munculnya ide-ide baru akan mengantarkan terhadap perubahan cara pandang terhadap sesuatu (Susilawati, 2012).

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa terdapat berbagai dimensi, salah satunya perubahan budaya setempat sebagai wujud dari pengaruh modernisasi yang dialami masyarakat, secara sederhana mampu dipahami adanya konflik unsur lama "tradisional" dengan unsur baru "modern" hingga terjadi penggabungan antara keduanya atau bahkan penolakan (Susilawati, 2012). contoh yang terjadi pada masyarakat desa Sidomulyo yaitu pergeseran budaya perempuan yang hanya berada di ruang domestik hingga pemahaman dan realita lapangan bahwa perempuan mampu berperan di ruang publik, sektor industri. Hal demikian menunjukkan bahwa budaya patriarki cenderung lebih melekat pada masyarakat tradisional setempat. Budaya patriarki atau yang sering disebut sebagai sistem keluarga patriarki merupakan sistem yang menempatkan laki-laki sebagai dominan dalam berbagai peran, baik di keluarga maupun masyarakat. Laki-laki cenderung dianggap sebagai *figur otoritas sentral*. Sehingga keluarga yang berpusat pada laki-laki sebagai pemegang otoritas merupakan keluarga dengan sistem patriarki yang mengikatnya.

Walaupun adanya budaya patriarki masih menempel pada masyarakat dusun Semampir, sebagian masyarakat setempat telah memberikan kebebasan anak-anak perempuannya untuk bekerja di sektor Industri, maupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi demikian menunjukkan modernisasi yang telah dialami oleh masyarakat setempat. Anak-anak perempuan dengan peran yang berada di ruang publik tentunya memiliki komunikasi dengan berbagai pihak yang mampu memberikan efek modernisasi yang dialami, kebaruan dalam menjalani kehidupan, bahkan akan berdampak terhadap tata keluarga ke depannya. Pergeseran paradigma tradisional ke paradigma modern yang

diasumsikan memberikan dampak terhadap perempuan menyandang beban ganda. Keadaan demikian mampu dilakukan dengan mengesampingkan pandangan stereotip terhadap perempuan dengan menerima keberadaan perempuan sebagai *the other*, mampu berinteraksi secara harmonis. Dengan upaya demikian akan mampu mewujudkan kesalingan, kesetaraan yang cenderung dinamis (Nur ajizah & Khomisah, 2021).

Multi Peran Perempuan

Istilah multiperan memiliki perbedaan dalam hasil pemaknaan. Terdapat kalangan yang mengelompokkannya menjadi cakupan; domestik dan publik, yang kemudian dikenal dengan peran ganda atau beban ganda. Perbedaan istilah yang digunakan tidak menjadi problem utama yang akan dikaji pada artikel ini. Sehingga akan langsung menuju kepada peran-peran yang disandang oleh perempuan setempat beserta penjelasannya.

Pada cakupan keluarga, perempuan memiliki peran untuk mensejahterakan keluarga. Bagi anaknya perempuan memiliki peran sebagai pengasuh dan pendidik (Supriyono, Iskandar, & Sucahyono, 2015), bahkan ia merupakan pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Bahkan tidak jarang perempuan dengan ruang publik yang harus dilakukannya, tetap harus menomorsatukan peran domestik yang mengikatnya. Hal demikian merupakan *impact* dari kontrol sosial yang masih menganggap bahwa ruang domestik merupakan ruang gerak perempuan. Anggapan demikian merupakan anggapan yang tertanam pada masyarakat tradisional, cenderung dengan pola keluarga dengan penerapan sistem patriarki. Sistem patriarki merupakan suatu konsep hubungan sosial yang cenderung memberikan peran laki-laki secara dominan dibandingkan perempuan (Supriyono et al., 2015).

Anggapan tersebut seiring dengan berkembangnya teknologi mampu membuka pemikiran masyarakat modern - bukan tradisional - bahwa perempuan memiliki ruang publik layaknya laki-laki. Salah Satunya hal yang mempengaruhi keterbukaan cara berpikir masyarakat modern yaitu pemahaman emansipasi, bahwa perempuan mampu menjadi apa saja yang ia mau tanpa harus meninggalkan apa yang harus dilakukannya dan posisinya sebagai istri dan ibu (Triana, 2022). Pengertian demikian bukan berarti memberikan pemahaman bahwa perempuan tidak sama sekali diberikan akses, namun cenderung perempuan memiliki kekuasaan dan tetap berada di bawah kontrol laki-laki. Secara sederhana mampu dipahami bahwa sistem patriarki memberikan ruang laki-laki untuk mendominasi perempuan

Pada satu sisi, cara pandang emansipasi yang ditanamkan oleh masyarakat modern dalam kehidupannya begitu mendukung perempuan untuk mendapatkan haknya, khususnya pada ruang publik. Pada sisi yang bersamaan masih terdapat pengaruh cara berpikir masyarakat tradisional bahwa perempuan ada pada ruang domestik. Keadaan demikian -

kontrol sosial masyarakat tradisional dan melakukan apa yang ia inginkan- mampu mendorong perempuan untuk melakukan dua hal yang berbeda dalam satu waktu, sehingga perempuan dituntut untuk melakukan peran ganda atau bahkan multi peran.

Multi peran yang disandang perempuan tidak mampu dipandang melalui kacamata beban yang cenderung menggiring terhadap ketidakadilan terhadap kesetaraan yang seharusnya didapatkan, namun hal demikian mampu dipandang sebagai bentuk positif yang mampu dijalani oleh perempuan, sebagaimana teori hibrida. Secara mendasar teori hibrida merupakan teori moral yang mampu mencakup berbagai kajian yang menyatakan bahwa kelas-kelas individu yang berbeda harus dilakukan pula secara berbeda (Fischer, Palmer, & Kasperbauer, 2023). Istilah hibrida menunjukkan adanya penggabungan dua jenis yang berbeda (Fischer et al., 2023), dalam hal ini penggabungan dari berbagai peran. Dasar pijakan teori hibrida merupakan adanya gagasan bahwa perempuan mampu menjalankan peran secara bersamaan tanpa saling menghalangi satu sama lain peran yang disandangnya. Pada teori ini perempuan dianggap memiliki fleksibilitas dalam menjalankan berbagai peran dalam tempo bersamaan. Teori hibrida dalam konteks peran perempuan mencakup berbagai aspek yang berkedudukan sebagai komponennya, adapun aspek-aspek yang dimaksud yaitu : multidimensionalitas peran, integrasi peran, adaptabilitas dan fleksibilitas, pentingnya dukungan sosial dan struktural, serta pemberdayaan perempuan.

Pertama, multidimensionalitas peran, pada komponen ini, teori hibrida memahami bahwa pada diri perempuan tidak ada Batasan hanya untuk menyandang satu peran, komponen ini secara tidak langsung menolak adanya stereotip yang menyatakan bahwa perempuan harus memilih satu peran yang mampu dijalankan. **Kedua**, integrasi peran, pada komponen ini menekankan adanya kemampuan perempuan untuk mengintegrasikan ragam peran dalam kehidupan, layaknya perempuan sebagai ibu sekaligus pekerja mampu menemukan cara dalam mengintegrasikan tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai ibu. **Ketiga**, adaptabilitas dan fleksibilitas, pada komponen ini teori hibrida mengatakan bahwa perempuan dianggap memiliki kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi, dimana dengan mudah perempuan berubah sesuai dengan peran yang ia sandang yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasional.

Keempat, pentingnya dukungan sosial dan struktural, pada komponen ini, teori hibrida mengatakan bahwa walaupun perempuan mampu melakukan berbagai peran dengan berhasil, namun perlu adanya dukungan sosial dan structural. Secara realita keadaan demikian mampu ditunjukkan dengan adanya fasilitas, kebijakan perusahaan (jika ia sebagai pekerja industri), perguruan tinggi, Lembaga sekolah (jika ia sebagai guru atau civitas akademik) yang mampu mendukung adanya keseimbangan kerja dan kehidupan, pun dukungan patner hidup selama menjalani perannya yang kompleks. **Kelima**, serta pemberdayaan perempuan, gagasan

pemberdayaan perempuan untuk mampu mengatakan iya atau tidak, menjalankan peran tanpa adanya limitasi yang kaku, pendidikan, kesetaraan dalam peluang mendapat dukungan penuh dari teori hibrida. Secara sederhana teori hibrida mampu dipahami sebagai teori yang merefleksikan pengakuan terhadap adanya evolusi peran gender, dan mensuport gagasan bahwa perempuan memiliki *capability* untuk menjalani berbagai peran dengan berhasil. Bukan hanya itu, teori ini mendukung gagasan bahwa perempuan mampu memainkan peran penting sebagai bentuk dukungan adanya keberlanjutan dan keberagaman pada masyarakat (Canclini, 1995).

3. Multi Peran Perempuan Dusun Semampir Menurut Pandangan sistem Hibrida dan Kesetaraan

Perempuan memiliki peran yang beragam, mulai dari predikat sebagai ibu (Zahrok & Suarmini, 2018), ibu rumah tangga, istri, pendidik, anggota tatanan masyarakat, dan pekerja. Sebagai penyandang predikat istri memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang istri (Syuhud, 2013). Peran istri dalam keluarga yang mengimplementasikan relasi keadilan dalam pasangan yaitu memiliki peran yang sama dengan suami untuk mewujudkan keluarga harmonis secara lahir dan batin. Memenuhi kewajibannya sebagai istri terhadap suami serta memiliki hak yang sama untuk dipenuhi kewajibannya sebagai istri - memenuhi kewajiban dan mendapat haknya. Pada predikat ini perempuan mampu menjadi partner, sahabat, pendamping, motivator, inspirator bagi suaminya.

Peran perempuan sebagai Ibu memiliki hak dihormati layaknya ibu oleh anaknya, pun ia memiliki tanggung jawab terhadap pola asuh Pendidikan Bersama pasangannya serta memiliki tanggung jawab akan keberhasilan anaknya (Kiong, 2008). Salah Satu upaya perwujudannya yaitu dengan memperhatikan anak-anak pada saat belajar di rumah. Sebagai anggota dalam tatanan masyarakat tentu memiliki hak dan kewajiban, di antara kewajiban bagi anggota masyarakat ialah mampu untuk bergaul, berkomunikasi, bersosialisasi secara baik antar sesama dalam upaya mengembangkan hidup (Ramadhani, 2016).

Pada masyarakat Semampir, perempuan setempat memiliki multi peran yang beragam, sesuai dengan keadaan masing masing; sebagai ibu rumah tangga dan pendidik, ibu rumah tangga, pendidik dan pekerja bersamaan perannya sebagai anggota tatanan masyarakat. Namun, dengan keragaman predikat perempuan setempat, penelitian ini membatasi objek kajian dengan fokus terhadap perempuan dengan ragam peran berusaha untuk ikut serta aktif berpartisipasi kegiatan keagamaan. **Pertama**, ibu A dengan predikat sebagai ibu rumah tangga (IRT), istri, mendidik anak, anggota tatanan masyarakat, pekerja tani (petani), ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan secara parsial dengan mempertimbangkan ekonomi pribadi.

Melalui percakapan langsung dengan peneliti, ibu A menyebut :

"kegiatan nek kene ki akeh tenan mbak, tapi gak kabeh wajib dieloki, nek melok kabeh gak kuat bayare, mergo yo kebutuane ora mok iku tok". Ibu A berkata: *"kegiatan di sini sangat banyak, tapi tidak semua wajib diikuti, kalau ikut semua tidak kuat untuk membayarnya, karena kebutuhannya bukan hanya itu saja".*

Kedua, ibu B menyandang sebagai ibu rumah tangga (IRT), istri, pendidik anak, anggota tatanan masyarakat, pekerja tani (petani) berupaya mengikuti segala kegiatan masyarakat yang bersifat keagamaan dengan agak mengesampingkan perannya sebagai ibu dengan menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada guru, baik di sekolah maupun madrasah diniyah setempat. Dalam percakapannya dengan ibu-ibu yang lain, Ibu B mengatakan, *"gek mau X (nama dari anak ibu B) wes budal ngaji, menisan sinau kelompok jarene"*. "Tadi X sudah berangkat belajar mengaji sekaligus belajar kelompok katanya". Dari data kegiatan, ibu tersebut mengikuti seluruh kegiatan keagamaan yang berlangsung di tempat tersebut, dan menyerahkan peran pendidikan kepada guru untuk anaknya.

Ketiga, ibu C dengan posisi sebagai ibu rumah tangga (IRT), istri, pendidik anak, anggota tatanan masyarakat, dan pekerja industri ikut serta berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat secara parsial, hal demikian ia lakukan dengan mempertimbangkan perannya sebagai pendidik bagi anaknya. Sintesis demikian ditemukan pada percakapan penulis dengan ibu C yang mengatakan :

"akeh kegiatan mba mbendinane, tapi aku yo kerjo ndek pabrik Kalen sek mulehe wes sore, dadine aku melu sebagiane, mergo yo ono Y seng nek sinau iku kan yo kudu diperhatikne, nek ora ono lak aku rangerti sekolah ngajine". Dalam bahasa Indonesia dipahami Ibu C mengatakan "Banyak kegiatan mbak setiap harinya, sedangkan saya pekerja di pabrik Kalen (nama daerah desa sebelah) dan waktu pulangnya larut, sehingga saya mengikuti sebagian kegiatan, karena Y dalam belajarnya haru di dampingi, agar saya mengetahui perkembangannya".

Berbagai predikat disandang oleh perempuan-perempuan desa Semampir, baik sebagai ibu rumah tangga, istri, pendidik anak, anggota tatanan masyarakat, pekerja (petani/industri). Perempuan memiliki berbagai pandangan dalam menyikapinya. Penyikapan-penyikapan yang dilakukan menunjukkan pemilihan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang dalam keikutsertaannya menjadi bagian dari norma dalam tatanan kemasyarakatan, dimana seorang anggota tatanan kemasyarakatan sudah selayaknya mengikuti norma-norma yang berlaku di dalamnya. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada mampu mempertemukan perempuan-perempuan dengan berbagai latar belakang sosialnya, pun tanggung jawab bersifat pribadi dalam lingkup tata keluarga yang melekat mampu dilepas pada kegiatan tersebut. Tanggung jawab yang beragam tidak menghalangi perempuan-perempuan setempat untuk ikut serta berperan aktif pada ruang publik. Demikian sebagai wujud dari usaha perempuan dalam

memanajemen tanggung jawab sehingga tidak menghalanginya untuk berpartisipasi pada semuanya.

Fakta lapangan yang telah penulis paparkan tentang perempuan-perempuan yang berada di desa Semampir berbanding lurus terhadap sistem hibrida yang menyatakan bahwa tidak ada garis pembatas bagi perempuan untuk menyandang tanggung jawab tunggal. Bukan hanya itu, perempuan dengan ragam tanggung jawab yang disandang dituntut untuk mampu mengintegrasikannya, hal demikian didukung oleh sistem hibrida yang memandang bahwa perempuan memiliki adaptabilitas dan fleksibilitas, di mana perempuan dianggap memiliki kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi. Secara mudah perempuan berubah sesuai dengan peran yang ia sandang yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasional, secara sederhana mampu melakukan adaptasi dan melakukan perubahan peran dalam waktu yang singkat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan.

Beranjak terhadap pandangan kesetaraan, pandangan kesetaraan baik sosial maupun gender telah tercermin pada realita kehidupan masyarakat setempat. Kesetaraan gender memandang bahwa adanya tingkatan sama, kedudukan sama, tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah. Keadaan demikian telah tercermin dari perempuan-perempuan setempat telah mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk ikut serta mengekspresikan diri dalam ruang publik, baik yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial (Sebagai tatanan masyarakat sosial), tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab pendidikan. Sedangkan kesetaraan sosial mampu tercermin dalam kegiatan keagamaan yang tanpa adanya pandangan sebelah mata untuk ikut serta berpartisipasi aktif dengan mengesampingkan sejenak status sosial pada masing-masing darinya.

4. Agama Sebagai Sarana Ruang Publik Perempuan

Kegiatan keagamaan yang diadakan oleh masyarakat setempat untuk perempuan *relative* cukup padat, kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimaksud yaitu. **Pertama**, *ratiban*, istilah ini didasarkan pada sesuatu yang dibaca pada kegiatan, yaitu *ratīb al-haddād*. Pembacaan dilakukan secara bersama-sama dengan satu orang sebagai pemandu bacaan yang kemudian ditirukan. Kegiatan ini sebagai kegiatan keagamaan rutin yang diadakan oleh masyarakat setempat dalam tempo satu kali dalam satu pekan, tepatnya pada hari sabtu malam atau malam minggu setelah waktu maghrib. Kegiatan ini dilakukan secara bergilir di rumah masing-masing yang mendapatkan giliran. Giliran didasarkan pada pendapatan, yang terdiri dari 37 anggota. Seseorang yang berlaku sebagai tuan rumah akan menyajikan jamuan berupa makanan dan minuman. Pembacaan *ratīb al-haddād* dilakukan secara bersama-sama (*berjamaah*) dengan satu orang sebagai pemimpin bacaannya. Kriteria yang mampu dijadikan

sebagai pemimpin bacaan ditujukan kepada mereka alumni pondok pesantren, mengingat sebagian besar sebagai alumni pondok pesantren, pemimpin dilakukan secara bergantian.

Kedua, *diba'an*. Sesuai dengan nama yang diberikan, pada kegiatan ini anggota jamaah membaca *maulid ad-dibā'*. Kegiatan dilakukan dengan semua anggota mendapatkan giliran untuk membaca, terhitung 15-20 ibu-ibu yang berpartisipasi pada masing-masing kegiatan. Pembacaan dilakukan dengan pengeras suara yang berada di *langgar* -istilah yang digunakan tempat ibadah salat, kegiatan yang bersifat keagamaan secara bersama-sama-, mengingat kegiatan dilakukan di tempat tersebut. *Langgar* pada dusun setempat berjumlah 4 buah, sehingga dilakukan secara bergilir. Pembacaan *dibaiyah* pada masyarakat setempat layaknya pembacaan *maulid dibā'* pada umumnya, di mana pembacaan dilakukan secara bergilir, sedangkan yang memimpin do'a yaitu mereka yang dianggap lebih mampu dengan mempertimbangkan aspek usia, layaknya norma masyarakat Jawa yang dikenal sebagai *unggah-ungguh*.

Ketiga, *tahlil*. Tidak berbeda dengan kegiatan sebelumnya, kegiatan ini pun dilakukan di langgar, begitupun tempo waktu yang dilakukan, satu kali dalam sepekan, tepatnya senin malam -malam selasa- dengan 30 anggota. **Keempat, *manaqib*.** Kegiatan ini dilakukan dengan tempo mingguan, tepatnya setiap malam senin pasca ritual ibadah sholat maghrib dengan anggota 45 jama'ah. Sesuai dengan nama kegiatan ,kegiatan dilakukan dengan membaca *Manāqib* Syaikh Abdul Qādir al-Jīlānī, sebuah riwayat hidup Syaikh Abdul Qādir al-Jīlānī. Layaknya *ratiban*, kegiatan ini dilakukan pada rumah pada masing-masing anggota yang mendapatkan giliran. adapun sistem pemandu bacaan *tahlil* ataupun *manaqib* layaknya pada kegiatan rajaban.

Kelima, *khataman Qur'an*. Agak berbeda dengan kegiatan lain yang sudah membudaya pada masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan dengan tempo bulanan, orang Jawa menyebut *selapanan* -hari jawa yang digabungkan dengan istilah hari secara umum, seperti jum'at legi, jum'at wage-. Sistem pembacaan layaknya pada kegiatan *dibaan*, namun kegiatan khataman memerlukan waktu dengan durasi cukup panjang, pasalnya khataman dimulai pasca shalat maghrib bahkan tidak jarang hingga pagi hari esoknya.

Berdasarkan aktifitas-aktifitas keagamaan *ratiban*, *dibaan*, dan *tahlilan*, dan *manaqiban*, perempuan-perempuan setempat menemukan ruang untuk berperan dalam publik. Ruang publik ditunjukkan dengan peran aktif perempuan-perempuan dalam mewujudkan keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang ada. Masing-masing darinya bukan sekedar hadir sebagai peserta, namun menjadi penyelenggara, dan penggerak kegiatan berlangsung. Aktivitas demikian relevan dengan konsep hybrid role bahwa perempuan memiliki multi peran, mencakup ruang publik, dan domestik dalam waktu yang bersamaan.

Proses kegiatan keagamaan yang dilakukan di *Langgar* dan di rumah menunjukkan adanya tatanan sosial yang ditaati oleh perempuan, sehingga terwujud aktivitas sosial terorganisir. Komunitas perempuan mendapatkan kesempatan ikut berperan aktif pada fasilitas ibadah umum. Namun pada waktu tertentu komunitas tersebut memiliki fleksibilitas untuk mengadakan kegiatan dalam rumah secara bergilir. Melalui aktivitas yang diadakan di Masjid dan Rumah, perempuan tidak sekedar mengakses ruang publik dalam cakupan religius, namun mereka mampu menciptakan ruang dan komunikasi sosial antar sesama tanpa membedakan status sosial.

Aktivitas keagamaan perempuan-perempuan dusun Semampir sebagai bagian dari sarana mereka berperan di ruang publik menjadi ruang negosiasi dengan tatanan masyarakat di wilayah pesisir Madura yang cenderung menggunakan teks agama sebagai pembentuk sistem patriarki (keterbatasan peran perempuan pada ruang domestik). Kesenjangan tatanan masyarakat dalam wilayah Jawa Timur tersebut menunjukkan bahwa sistem patriarki diterapkan secara utuh dalam masyarakat modern. Adanya pergeseran cara pandang, akses pendidikan, menjadi salah satu dugaan yang mampu mewujudkannya, tentu demikian perlu adanya kajian lebih lanjut.

5. Kesimpulan

Anggapan bahwa kegiatan keagamaan mampu menjadi sarana perempuan-perempuan dusun Semampir berperan di ruang publik, diperkuat dalam penelitian ini dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Perempuan-perempuan dusun Semampir memiliki multi peran yang beragam, di antaranya sebagai ibu rumah tangga dan pendidik, ibu rumah tangga, pendidik dan pekerja bersamaan perannya sebagai anggota tatanan masyarakat. Multi peran yang disandang oleh perempuan-perempuan setempat tidak menghalanginya untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut mereka mampu memerankan peran dalam ruang publik. Keaktifan perempuan dalam kegiatan tersebut ditunjukkan dengan aktivitas perempuan dalam mewujudkan, mengorganisir kegiatan secara aktif dan efektif. Bahkan melalui kegiatan keagamaan tersebut, perempuan-perempuan setempat mampu menciptakan interaksi sosial secara interaktif.

Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pematahan argumen penelitian sebelumnya yang menganggap bahwa agama menjadi legitimasi pembatasan terhadap perempuan. Melalui peran perempuan dalam ruang publik, terdapat kesetaraan gender yang dicerminkan, di mana perempuan-perempuan desa setempat yang cenderung sebagai lingkungan yang menganut budaya patriarki mampu mengekspresikan dirinya pada ruang publik melalui kegiatan keagamaan. Ragam peran yang disandang perempuan setempat pada masing-masing individu tidak menghalangi pada tiap tanggung jawab lain yang disandangnya. Hal demikian memiliki

korelasi dengan sistem hibrida yang mengakui adanya *capability* perempuan untuk menjalani berbagai peran dengan berhasil. Bukan hanya itu, teori ini mendukung gagasan bahwa perempuan mampu memainkan peran penting sebagai bentuk dukungan adanya keberlanjutan dan keberagaman pada masyarakat.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang di kemudian hari dapat dikembangkan lebih jauh oleh peneliti selanjutnya. Di antaranya dalam hal pengembangan paradigma transisi dari tradisional ke masyarakat modern. Selain itu, berbagai pendekatan bisa diaplikasikan terutama dalam mengeksplorasi berbagai kegiatan keagamaan dan dampaknya bagi partisipasi dan peran perempuan secara lebih luas yang mampu mempengaruhi kebijakan yang berperspektif gender.

6. Referensi

- Andriani, O., Soraya, A. N., Sari, N., & Gunawan, A. (2024). Keterlibatan Orang Tua Dalam Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 4(2), 31-41. <https://doi.org/10.37216/badaa.v6i1.1413>
- Anggraini, C., Ritonga, D. H., Kristina, L., Syam, M., & Kustiawan, W. (2022). Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3). <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2611>
- Aryatie, I. R., Thalib, P., & Usanti, T. P. (2022). Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Madiun. *Janaloka Jurnal*, 2(1), 139-155.
- Aziz, A., & Fatma, A. (2013). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Orang Tua yang Memiliki Anak Autis. *Talenta Psikologii*, 2(2), 1-17.
- Bellaputri, A., Purba, F. D., & Qodariah, L. (2022). Kualitas Hidup Orang Tua Dari Anak Dengan Disabilitas Intelektual: Studi Kualitatif. *Journal of Psychological Science and Profession*, 6(1), 42. <https://doi.org/10.24198/jpsp.v6i1.32807>
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1994). Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis Sheldon. *Psychological Bulletin*, 16(1), 20-31. [https://doi.org/10.1016/0163-8343\(94\)90083-3](https://doi.org/10.1016/0163-8343(94)90083-3)
- Fauziah, A. N. (2017). Keluarga Sehat Berdasarkan Pendekatan Keluarga di RW 03 Kalurahan Mojosongo Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36419/jkebin.v8i1.165>
- Izzah, N. M. (2022). Penerimaan Diri Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Putra. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Jenaabadi, H. (2013). On the Relationship Between Perceived Social Support and Blind and Low-Vision Students' Life Satisfaction and Self Confidence. *Journal of Education and Instructional Studies in the World*, 3(1), 105-111.
- Kalalo, D. K. R., Tambingon, H. N., & Rotty, V. N. J. (2022). Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi dan Dampaknya pada Kreativitas Pembelajaran Guru-guru Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Utara Indonesia. *Jote (Journal on Teacher Education)*, 4(2), 41-47.

- Kelana, S. (2022). Dukungan Sosial Keluarga Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Peduli Anak Nagari Kecamatan Akabiluru. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(2), 99–111. <https://doi.org/10.38035/rrj.v4i2.441>
- Ni'matuzahroh, & Nurhamida, Y. (2016). *Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*. Malang: UMM Press.
- Nurrohmah, S. (2021). Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Retrieved from kumparan.com website: <https://kumparan.com/syifa-nurrohmah/pendidikan-inklusif-untuk-anak-berkebutuhan-khusus-1v3qcP49ItF/4>
- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>
- Rahmawati, S. (2017). Pengaruh Religiusitas Terhadap Penerimaan diri Orangtua Anak Autis di Sekolah Luar Biasa XYZ. *JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i1.248>
- Rosalina, T. A., & Apsari, N. C. (2020). Dukungan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 414. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28486>
- Setyaningsih, R., Mariza, A., Hastuti, L. S., Harahap, S. A., Puspitosari, A., Parinduri, S. A., & Prasetyaningsih, R. H. (2022). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (M. Dodiet Aditya Setyawan, SKM., Ed.). Tahta Media Group.
- Setyawan, A., Mawarni, C. D., & Al., E. (2020). Pengaruh Perkembangan Psikologis Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Keleyan no 8 Socah Bangkalan Agung. *Prosiding Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro*, 1(1), 420–430.
- Uraningsari, F., & Djalali, M. A. (2016). Penerimaan Diri, Dukungan Sosial dan Kebahagiaan Pada Lanjut Usia. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 5(01). <https://doi.org/10.30996/persona.v5i01.738>
- Wahyuni, N. (2018). Peran Pendidikan Vokasi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Menghadapi Tantangan Zaman. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 4(2), 137–147.
- Winarsih, M., Nasution, E., & Ori, D. (2020). Hubungan dukungan keluarga dengan penerimaan diri orang tua yang memiliki ABK di SLB cahaya pertiwi Kota Bekasi. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4(2), 73–81.